BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(3) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
   Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan;
b. BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
   Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;

c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan program dan kegiatan;

d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Memuat kebijakan umum rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan

e. BAB V : PENUTUP

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan dokumen Rencana Kerja dari:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
i. Dinas Tenaga Kerja;
j. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
k. Dinas Lingkungan Hidup;
l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
s. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
t. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
u. Dinas Pertanian;
v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
w. Sekretariat Daerah;
x. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
y. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
aa. Badan Pendapatan Daerah;
bb. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
cc. Inspektorat Daerah;
dd. Kecamatan Bagor;
ee. Kecamatan Baron;
ff. Kecamatan Berbek;
gg. Kecamatan Gondang;
hh. Kecamatan Jatikalen;
ii. Kecamatan Kertosono;
jj. Kecamatan Lengkong;
kk. Kecamatan Loceret;
ll. Kecamatan Nganjuk;
mm. Kecamatan Ngetos;
nn. Kecamatan Ngluyu;

oo. Kecamatan Ngronggot;
pp. Kecamatan Pace;
qq. Kecamatan Patianrowo;
rr. Kecamatan Prambon;
ss. Kecamatan Rejoso;
tt. Kecamatan Sawahan;
uu. Kecamatan Sukomoro;
vv. Kecamatan Tanjunganom;
ww. Kecamatan Wilangan; dan
xx. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

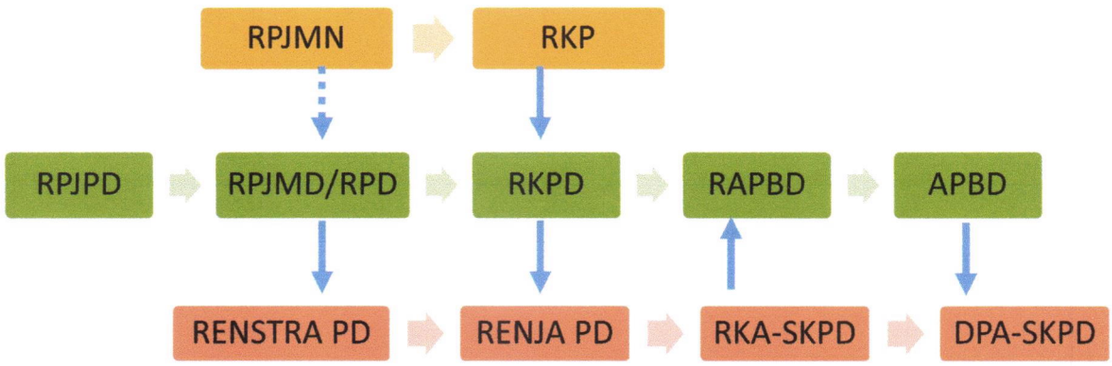
Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), serta Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.1
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:
diperhatikan
dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan - Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 15).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Merumuskan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
b. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, pagu indikatif, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2025;
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025; dan
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2024, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerahdan Penapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Target Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pemerintahan									
	Fungsi Penunjang Pengawasan									
	Bidang Pengawasan									
	Program Penunjang Urusan Pemerintshan Daerah Kabupaten/ Kota	**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Perangkat Daerah**	**-**	-	**90%**	**85,37%**	**94,85%**	-	-	-
		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	**87**	-	-	-	-	**85**	**81,70**	**96,11%**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	**14 dokumen**	-	-	-	-	**14 dokumen**	**14 dokumen**	**100%**

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerahdan Penapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Target Realisasi (%)
					Daerah yang disusun								
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerahdan Penapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Target Realisasi (%)
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja	7 laporan	-	7 laporan	7 laporan	100%	7 laporan	7 laporan	100%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerahdan Penapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Target Realisasi (%)
					dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD								
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**7 dokumen**	-	-	-	-	**7 dokumen**	**7 dokumen**	100%
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100%
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%
				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian Barang Milik	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerahdan Penapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Target Realisasi (%)
					Daerah dan hasil koordinasi penilaian Barang Milik Daerah SKPD								
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	-	-	-	-	2 laporan	2 laporan	100%
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**63 dokumen**	-	-	-	-	63 dokumen	63 dokumen	100%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerahdan Penapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Target Realisasi (%)
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 orang/bln	-	51 orang/bln	51 orang/bln	98,14%	55 orang/bln	55 orang/bln	100%
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	52 dokumen	-	-	-	-	52 dokumen	52 dokumen	100%
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	4 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerahdan Penapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Target Realisasi (%)
		SKPD								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	6 laporan	-	-	-	-	6 laporan	6 laporan	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**51 dokumen**	-	-	-	-	**55 dokumen**	**55 dokumen**	100%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	4 unit	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerahdan Penapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Target Realisasi (%)
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	110 paket	-	118 paket	118 paket	100%	-	-	-
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	55 dokumen	-	-	-	-	55 dokumen	55 dokumen	100%
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	45 orang	-	54 orang	48 orang	88,88%	45 orang	45 orang	100%
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	55 orang	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerahdan Penapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Target Realisasi (%)
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	55 orang	-	54 orang	51 orang	94,44%	55 orang	55 orang	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**51 dokumen**	-	-	-	-	**49 dokumen**	**49 dokumen**	100%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	-	4 paket	4 paket	100%	2 paket	2 paket	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 paket	-	4 paket	4 paket	100%	9 paket	9 paket	100%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerahdan Penapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Target Realisasi (%)
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket	-	4 paket	4 paket	100%	4 paket	4 paket	100%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	-	4 paket	4 paket	100%	5 paket	5 paket	100%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	-	4 paket	4 paket	100%	5 paket	5 paket	100%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerahdan Penapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Target Realisasi (%)
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	-	36 laporan	86 laporan	100%	36 laporan	36 laporan	100%
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
				Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**80 unit**	-	-	-	-	161 unit	161 unit	100%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerahdan Penapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Target Realisasi (%)
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	-	-	-	-	-	-	-
				Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	45 unit	-	55 unit	55 unit	100%	85 unit	85 unit	100%
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	35 unit	-	193 unit	193 unit	100%	76 unit	76 unit	100%
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 laporan**	-	-	-	-	**12 laporan**	**12 laporan**	100%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerahdan Penapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Target Realisasi (%)
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	-	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	-	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	-	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	4 laporan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**105 unit**	-	-	-	-	94 unit	94 unit	100%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerahdan Penapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Target Realisasi (%)
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenadaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	17 unit	-	12 unit	12 unit	100%	15 unit	15 unit	100%
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	35 unit	-	28 unit	25 unit	89,28%	30 unit	30 unit	100%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	48 unit	-	45 unit	104 unit	144,44%	45 unit	45 unit	100%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	-	4 unit	4 unit	100%	4 unit	4 unit	100%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerahdan Penapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Target Realisasi (%)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Persentase PKPT yang dilaksanakan**	**-**	-	**100%**	**90,75%**	**90,75%**	**-**	**-**	**-**
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan unsur SPIP	**70%**	-	-	-	-	**60%**	**60%**	**100%**
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Terselenggaranya pengawasan internal**	-	-	100%	88,69%	88,69%	**-**	**-**	**-**
		Jumlah PD yang menerapkan manajemen risiko	**35 OPD**	-	-	-	-	30 OPD	30 OPD	100%
		Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah (mandatory) yang direviu	**100%**	-	-	-	-	100%	100%	100%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerahdan Penapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Target Realisasi (%)
					Persentase jumlah rekomendasi BPK yang selesai ditindaklanjuti	**80%**	-	-	-	-	70%	70%	100%
					Persentase jumlah temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	**92%**	-	-	-	-	90%	90%	100%
				Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	8 laporan	-	3 laporan	3 laporan	100%	8 laporan	8 laporan	100%
				Pengawasan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	10 laporan	-	10 laporan	7 laporan	70%	-	-	-
				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	2 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	2 laporan	2 laporan	100%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerahdan Penapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Target Realisasi (%)
				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	119 laporan	-	119 laporan	124 laporan	104,20%	119 laporan	119 laporan	100%
				Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	100 laporan	-	75 laporan	35 laporan	46,66%	100 laporan	100 laporan	100%
				Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 kesepakatan	-	1 kesepakatan	1 kesepakatan	100%	1 kesepakatan	1 kesepakatan	100%
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	6 dokumen	-	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dokumen	100%
				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	**Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu**	-	-	95%	87,5%	87,5%	-	-	-

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerahdan Penapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Target Realisasi (%)
					Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilakukan	**8 laporan**	-	-	-	-	8 laporan	8 laporan	100%
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	4 laporan	-	4 laporan	1 laporan	25%	4 laporan	4 laporan	100%
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	4 laporan	-	4 laporan	6 laporan	150%	4 laporan	4 laporan	100%
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Persentase aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi yang mencapai target**	-	-	80%	86%	107,5%	-	-	-
					Persentase Perangkat	**15%**	-	-	-	-	10%	10%	100%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerahdan Penapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Target Realisasi (%)
					Daerah yang melakukan FCP (*Fraud Control Planning*)								
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	-	-	100%	100%	100%	-	-	-
					Jumlah kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	**2 kegiatan**	-	-	-	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	-	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang	1 rekomendasi	-	1 rekomendas	1 rekomend	100%	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerahdan Penapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Target Realisasi (%)
	Pengawasan	fasilitasi pengawasan yang disusun			i	asi				
	Pendampingan dan Asistensi	**Terselenggaranya pendampingan dan asistensi**	-	-	90%	92,6%	102,77%	-	-	-
		Jumlah perangkat daerah yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi	**52 OPD**	-	-	-	-	52 OPD	52 OPD	100%
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	52 OPD	-	50 OPD	50 OPD	100%	52 OPD	52 OPD	100%
	Pendampingan, Asistensi,	Jumlah perangkat daerah	52 OPD	-	30 OPD	21 OPD	70%	52 OPD	52 OPD	100%

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerahdan Penapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (%)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Target Realisasi (%)
	Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi								
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verivikasi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	3 kegiatan	-	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakkan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	52 OPD	-	50 OPD	50 OPD	100%	52 OPD	52 OPD	100%

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	94,85%	Sangat Tinggi
Program Penyelenggaran Pengawasan	90,75%	Tinggi
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	86%	Tinggi

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan

dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama (core bussiness) dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.5

a. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Prosentase Rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti			√	85,5%	86%	85,5%	-	-	98,23%	97,64%	92,46%	-	-	
2	Prosentase tindak lanjut temuan yang selesai			√	95%	95%	95%	-	-	96,2%	95,98%	94,17%	-	-	
3	Prosentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai A	√			10%	15%	20%	-	-	18%	40%	16%	-	-	
4	Persentase penyelesaian pengaduan publik			√	90%	90%	90%	-	-	94,11%	96,77%	96,66%	-	-	
5	Prosentase temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang selesai			√	85%	85%	90%	-	-	88,03%	85,03%	78,52%	-	-	
6	Level Kapabilitas APIP			√	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	
7	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart		√		NA	NA	NA	28%	30%	NA	NA	NA	30%	36%	

b. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024 (TW II)	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6			7	8
1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standard*		√		30%	32%	32%	36%	30%
2	Level Kapabilitas APIP**			√	3 (3,000)	3 (3,100)	3 (3,250)	3 (3,000)	3 (3,000)
3	Nilai Maturitas SPIP**				3,150	3,200	3,250	3,169	3,200

Catatan:

* Untuk persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart pada tribulan II menggunakan hasil penilaian 2023, karena pada tahun 2024 masih belum dilakukan proses penilaian

** Level Kapabilitas APIP dan Nilai Maturitas SPIP sesuai dengan surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur hal Pemberitahuan Penetapan Hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk

2.3. Deskripsi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Ada beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah yang dapat diselesaikan melalui program/kegiatan sebagai berikut:

No	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Program/Kegiatan
1	Peningkatan kapasitas Unit Pengelola Risiko Pemerintah Daerah, Unit Pengelola Risiko Perangkat Daerah dan Penjamin Kualitas dalam menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi/Pendampingan dan Asistensi
2	Penyusunan Prosedur kerja (Tools) implementasi sistem pengawasan Daerah	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi/Pendampingan dan Asistensi
3	Inovasi pengawasan daerah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

2.4. Deskripsi permasalahan dan hambatan yang dihadapai dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yaitu:

No	Uraian	Keterangan
1	Perlu peningkatan kualitas perencanaan tingkat organisasi perangkat daerah	- Dibuktikan dari LHE AKIP oleh Inspektorat pada masing-masing OPD, masih banyak OPD yang perlu perbaikan dari komponen perencanaan kinerja, diantaranya: a. Indikator target tidak selaras dengan SK IKU dan IKU pada Renstra b. Pohon kinerja belum mengidentifikasi kemungkinan adanya outcome antara yang

No	Uraian	Keterangan
		menjadi kinerja organisasi lain *(crosscutting)* c. Masih ada perjanjian kinerja Kepala OPD yang masih tidak selaras dengan dokumen renstra d. Tujuan pada renja belum selaras dengan renstra e. IKU yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tidak selaras dengan sasaran pada renstra f. IKU tidak *sustainable* (telah mengalami perubahan dalam 1 periode perencanaan strategis) g. Penetapan sasaran dan indikator sasaran kinerja pada perjanjian kinerja belum selaras dengan sasaran dan indikator sasaran pada penetapan IKU dan renstra - Dibuktikan dengan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 oleh KemenpanRB, terdapat beberapa catatan pada Komponen Perencanaan Kinerja, yaitu: a. Masih ditemukan sebagian perangkat daerah merumuskan kinerja strategis belum berorientase hasil sesuai dengan levelnya dan indikator kinerja yang dimiliki belum sepenuhnya relevan dan cukup untuk mengukur pencapaian kinerja strategis b. Belum sepenuhnya pohon kinerja yang dimiliki menjenjangkan kinerjanya secara logis karena hubungan

No	Uraian	Keterangan
		antar level kinerja tidak memiliki kausalitas/keterkaitan dan cenderung masih ditemukan pola hubungan kinerja yang *redundant* antar leveling kinerja c. *crosscutting* pada pohon kinerja khususnya pada penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya menggambarkan *sharing outcome* antar lintas tugas dan fungsi yang dimiliki perangkat daerah benar-benar mempengaruhi percepatan penanggulangan kemiskinan, karena penyusunannya belum berdasarkan *critical succes factor* (CSF) - Dibuktikan dari Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa catatan yaitu: a. terdapat indikator kinerja sasaran strategis dan target kinerja pemerintah daerah yang belum memperhatikan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) b. terdapat sasaran strategis PD memiliki target dan indikator kinerja yang tidak terkait dengan sasaran strategis pemda c. terdapat rumusan sasaran program dan sasaran kegiatan

No	Uraian	Keterangan
		belum berorientasi hasil d. terdapat indikator kinerja belum ditetapkan dengan tepat dan target kinerja belum mempertimbangkan target kinerja level diatasnya)
2	Kompetensi pegawai khususnya pada SATGAS-SPIP struktur pengelola risiko terkait manajemen risiko perlu ditingkatkan	Sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk pasal 4 ayat 3 huruf (d) yang berbunyi "tersedianya program pelatihan Manajemen Risiko untuk seluruh pegawai"
3	Proses penerapan manajemen risiko belum sepenuhnya memadai dan masih sebatas pemenuhan formal, karena belum dilakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko	1. Belum adanya pelaporan evaluasi atas RTP setiap triwulannya oleh unit kepatuhan 2. Belum optimalnya pengelolaan risiko fraud pada Perangkat Daerah
4	Sebagian besar SKPD belum memiliki risk register terkait fraud/pencegahan korupsi	Belum adanya pedoman yang mengatur tentang rencana pengendalian kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
5	Kurang optimalnya koordinasi untuk peningkatan kinerja terhadap penyelenggaraan SPIP antar SKPD terkait yaitu dengan BAPPEDA, Sekretariat Daerah, BPKAD, BKPSDM, dan Inspektorat	Kurang berperannya SATGAS-SPIP

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas dalam pengawasan internal dalam mengawal tata kelola Pemerintah Daerah yang mempunyai indikator tujuan nilai maturitas SPIP Pemerintah Daerah. Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada level 3 (Nilai: 3,169) pada tahun 2023. Level tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, pada tahun 2022 Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada level 3 dengan (Nilai: 3,111).

Nilai maturitas Penyelenggaraan SPIP sesuai dengan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk mendapatkan Skor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3,169, Skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) 3,038 dan Skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 2,790. Hal tersebut disebabkan atas beberapa hal antara lain:

a. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

1. Terdapat rumusan sasaran program dan sasaran kegiatan belum berorientasi hasil;
2. Terdapat indikator kinerja belum ditetapkan dengan tepat dan target kinerja belum mempertimbangkan target kinerja level diatasnya;
3. Sistem pengumpulan data kinerja masih belum memadai sehingga data kinerja yang dihasilkan tidak andal;
4. Target indikator kinerja perangkat daerah masih ada yang belum spesifik/belum jelas sehingga capaian kinerja tidak dinilai;
5. Sasaran program dan sasaran kegiatan, indikator dan targetnya masih ada yang belum ditetapkan dengan tepat dan baik serta keandalan data hasil capaian kinerja belum andal.

b. Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)

1. Belum mengalokasikan sumberdaya yang memadai untuk penerapan manajemen risiko;
2. Belum seluruh OPD memutakhirkan dokumen penilaian risiko secara berkala;
3. Upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang belum memadai;
4. Belum dilakukan monitoring efektifitas tindak pengendalian;
5. APIP belum melakukan reviu proses manajemen risiko serta monitoring pada seluruh OPD secara berkala.

c. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

1. Pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku antikorupsi belum memadai;
2. Alokasi sumberdaya untuk aktivitas pengelola risiko korupsi belum memadai;
3. Sebagian besar OPD belum melakukan penilaian risiko korupsi.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) belum menetapkan praktik profesional audit internal secara seragam dan telah selaras sepenuhnya dengan standart audit. Terlihat juga dari masih banyaknya temuan hasil pengawasan eksternal pada Perangkat Daerah yang membutuhkan banyak perbaikan pada sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundang-undangan atau struktur/ manajemen Perangkat Daerah. Permasalahan diatas disebabkan karena Perangkat Daerah belum mampu mengidentifikasi resikonya sehingga belum dapat memetakan resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

2.5. Deskripsi tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian internal terhadap kebijakan Kepala Daerah sebagai berikut:

1) Tantangan
   a. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN;
   b. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh SKPD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku;
   c. Rendahnya nilai Manajemen Risiko Indeks dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi;
   d. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh SKPD;

2) Peluang

1. Dukungan dari KPK-RI terkait pencegahan korupsi melalui program (Monitoring Control for Prevention) MCP, Strategi Nasional (Stranas) KPK-RI dan Survei Penilaian Integritas (SPI);
2. Kebijakan Pemerintah Pusat yang terus mendorong ke arah transparansi pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit, dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah;
4. Rapat koordinasi pengawasan daerah tahunan membahas isu-isu strategis pengawasan dan penguatan APIP;
5. Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan RB, Kemendagri, BPK-RI, dan BPKP) agar APIP mampu memberikan peringatan dini *(early warning system)* dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
6. Sinergisitas APIP dengan APH melalui MOU Nomor 415.43/19/411.010/2018; B-1471/0.5.29/Fs/09/2018; B/2486/IX/2018 Tahun 2018 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk.

2.6. Deskripsi kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk bukan merupakan unit penyelenggara pelayanan publik, tetapi memberikan pelayanan secara tidak langsung kepada penerima layanan dan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk melakukan pelayanan berupa pengawasan dan pembinaan kepada OPD selaku obyek pemeriksaan.

Pelayanan yang secara tidak langsung dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk adalah pada kegiatan pemeriksaan internal secara berkala, kegiatan penanganan

pengaduan/pemeriksaan tujuan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Kegiatan Probity Audit.

Visi pembangunan jangka panjang Kabupatan Nganjuk yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah "Nganjuk Yang Maju, Adil, dan Sejahtera", dan dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Nganjuk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika dan berbudaya.
2. Mewujudkan Nganjuk yang berdaya saing.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
4. Mewujudkan masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur.
5. Mewujudkan Nganjuk yang aman, tenteram, tertib, dan damai.
6. Mewujudkan Nganjuk yang asri, nyaman, dan lestari.

Dalam pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka panjang dimaksud dijabarkan dalam RPD Tahun 2024-2026 dengan tujuan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
4. Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya.

Inspektorat Daerah memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik melalui Kualitas Pengawasan".

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya lautsecara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi *(means of implementation)* dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.6
Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) di Kabupaten Nganjuk Sampai Tahun 2023

No	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Baseline (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Catatan Penting
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Tujuan SDGs 16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan													
	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.													
	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD, Inspektorat
2	Tujuan SDGs 16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan													

No	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Baseline (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Catatan Penting
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan													
	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.													
	Maturitas SPIP	Level	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	Inspektorat

Sumber: Hasil Evaluasi Capaian TPB Perangkat Daerah Tahun 2023

2.8 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses reviu rancangan awal RKPD Tahun 2025 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.7
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintshan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	87	13.484.000	Program Penunjang Urusan Pemerintshan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	87	13.625.858,762	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	14 dokumen	58.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	11 dokumen	109.236,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	10.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	48.090,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	6.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	16.788	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen	1 dokumen	6.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen	1 dokumen	16.788	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
			perubahan RKA-SKPD					perubahan RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	6.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	6.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 laporan	18.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 laporan	27.570	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	6.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**7 dokumen**	**12.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**18 dokumen**	**69.932**	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2.500	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	17.612	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	2.500	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil penilaian Barang Milik	1 laporan	2.500	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganju	Jumlah laporan hasil penilaian Barang Milik	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
			Daerah dan hasil koordinasi penilaian Barang Milik Daerah SKPD				k	Daerah dan hasil koordinasi penilaian Barang Milik Daerah SKPD			
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	2.500	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 laporan	52.320	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	2.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**63 dokumen**	**9.646.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**98 dokumen**	**7.875.798**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 orang/bln	9.500.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51 orang/bln	7.788.543	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	52 dokumen	110.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	97 dokumen	72.180	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah dokumen koordinasi	4 dokumen	6.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganju	Jumlah dokumen koordinasi	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
		Kab.Nganjuk	dan pelaksanaan akuntansi SKPD				k	dan pelaksanaan akuntansi SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	18.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	15.075	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan	6 laporan	12.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	
			koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD					koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**55 dokumen**	**949.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**51 dokumen**	**1.358.716,980**	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	4 unit	30.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	-	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket pakaian	110 paket	42.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Inspektorat Daerah Kab.Nganju	Jumlah paket pakaian dinas beserta	51 paket	28.201,980	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
			dinas beserta atribut kelengkapan			Kelengkapannya	k	atribut kelengkapan			
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	55 dokumen	7.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	-	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dn fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	45 orang	500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dn fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	45 orang	848.300	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	55 orang	70.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganju	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	
			peraturan perundang-undangan				k	peraturan perundang-undangan			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	55 orang	300.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	51 orang	482.215	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**51 dokumen**	**1.032.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**50 dokumen**	**758.735**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket komponen instalasi listrik/pener	4 paket	25.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan	4 paket	28.277,435	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
			angan bangunan kantor yang disediakan			Kantor		bangunan kantor yang disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 paket	25.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	14.275	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket	20.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	19.524,500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	190.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	209.741,915	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	35.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	35.139,150	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	15.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	12.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	30.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	23.283	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah	Jumlah laporan penyelenggar	36 laporan	442.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Inspektorat Daerah Kab.Nganju	Jumlah laporan penyelenggara	36 laporan	333.244	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	
		Kab.Nganjuk	aan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			SKPD	k	an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	50.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	-	-	
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	200.000	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	83.250	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	**Inspektorat Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada**	**80 unit**	**780.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Inspektorat Daerah Kab.Nganju**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada**	**303 unit**	**2.423.489,632**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	
	Pemerintah Daerah	**Kab.Nganjuk**	**Perangkat Daerah yang disediakan**			**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**k**	**Perangkat Daerah yang disediakan**			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	999.000	
	Pengadaan Mebel	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket mebel yang disediakan	45 unit	130.000	Pengadaan Mebel	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket mebel yang disediakan	145 unit	412.593,105	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	35 unit	650.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	156 unit	1.011.896,527	
	Penyediaan Jasa	**Inspektorat**	**Jumlah**	**12**	**387.000**	**Penyediaan Jasa**	**Inspektora**	**Jumlah**	**12 laporan**	**480.050**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Daerah Kab.Nganjuk**	**Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**laporan**		**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**t Daerah Kab.Nganjuk**	**Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	12.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	11.250	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	250.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	186.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	125.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	282.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**105 unit**	**620.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**128 unit**	**549.900,650**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	17 unit	250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dan	24 unit	210.124,650	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
			dan dan dibayarkan pajak dan perizinannya			Lapangan		dibayarkan pajak dan perizinannya			
	Pemeliharaan Mebel	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah mebel yang dipelihara	35 unit	35.000	Pemeliharaan Mebel	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah mebel yang dipelihara	50 unit	20.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	48 unit	85.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit	100.512	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	250.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4 unit	219.264	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan unsur SPIP	70%	1.285.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan unsur SPIP	70%	998.140,700	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah PD yang menerapkan Manajemen Risiko	35 OPD	310.000	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah PD yang menerapkan Manajemen Risiko	35 OPD	798.126,700	
			Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah (mandatory) yang direviu	100%	225.000			Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah (mandatory) yang direviu	100%		
			Persentase jumlah rekomendasi BPK yang	80%	425.000			Persentase jumlah rekomendasi BPK yang	100%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	
			selesai ditindaklanjuti					**selesai ditindaklanjuti**			
			Persentase jumlah temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	**92%**	**25.000**			**Persentase jumlah temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti**	**92%**		
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	8 laporan	230.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	4 laporan	164.836	
	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	2 laporan	35.000	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	1 laporan	35.480	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	119 laporan	70.000	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	119 laporan	98.100	
	Pengawasan Desa	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	100 laporan	120.000	Pengawasan Desa	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	100 laporan	54.000	
	Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 kesepakatan	80.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 kesepakatan	52.178,200	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan	6 dokumen	450.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan	6 dokumen	393.532,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	
			tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP					tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP			
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilakukan**	**8 laporan**	**300.000**	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilakukan**	**2 laporan**	**200.014**	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	4 laporan	80.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	1 laporan	40.264	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan	4 laporan	220.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah Kab.Nganju	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan	1 laporan	159.750	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
			tujuan tertentu				k	tujuan tertentu			
3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIKAJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**		**Persentase Perangkat Daerah yang melakukan FCP (Fraud Control Planning)**	**15%**	**1.090.000**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIKAJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**		**Persentase Perangkat Daerah yang melakukan FCP (Fraud Control Planning)**	**15%**	**1.234.813.820**	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional**	**2 kegiatan**	**210.000**	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional**	**2 kegiatan**	**245.910**	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	80.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	142.910	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	130.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	103.000	
	Pendampingan dan Asistensi	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan**	**52 OPD**	**880.000**	**Pendampingan dan Asistensi**	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan**	**52 OPD**	**988.903,820**	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan	52 OPD	400.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan	52 OPD	426.100,060	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
			pemerintahaan daerah					pemerintahan daerah			
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	52 OPD	90.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	52 OPD	71.020	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantas	3 kegiatan	300.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasa	3 kegiatan	437.049,760	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	
			an korupsi					n korupsi			
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	52 OPD	90.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	52 OPD	54.734	
TOTAL					**15.859.000**	**TOTAL**				**15.858.813, 282**	

2.9 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari akademisi, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi, serta keterwakilan Desa dan/atau Kelurahan yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dengan 8 (delapan) Prioritas Nasional:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan Sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusi (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generesi milenial dan generasi Z), dan Penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Pengawasan", adapun

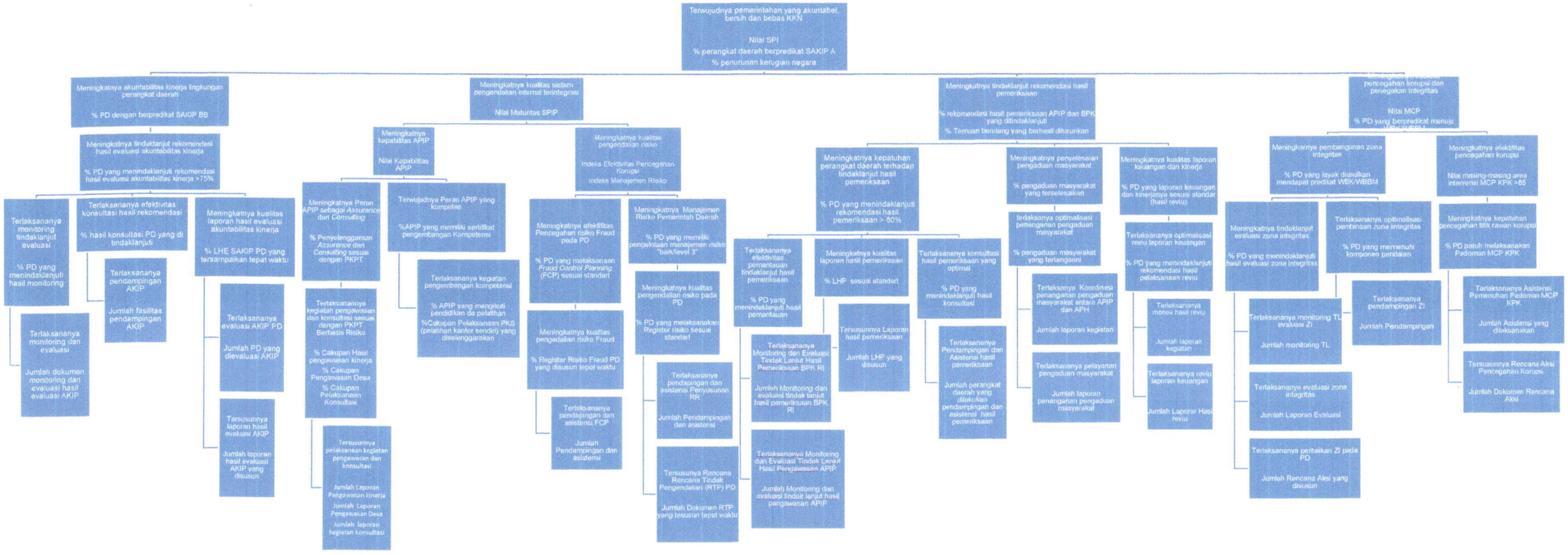
sasaran yang akan dicapai adalah "Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel", dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

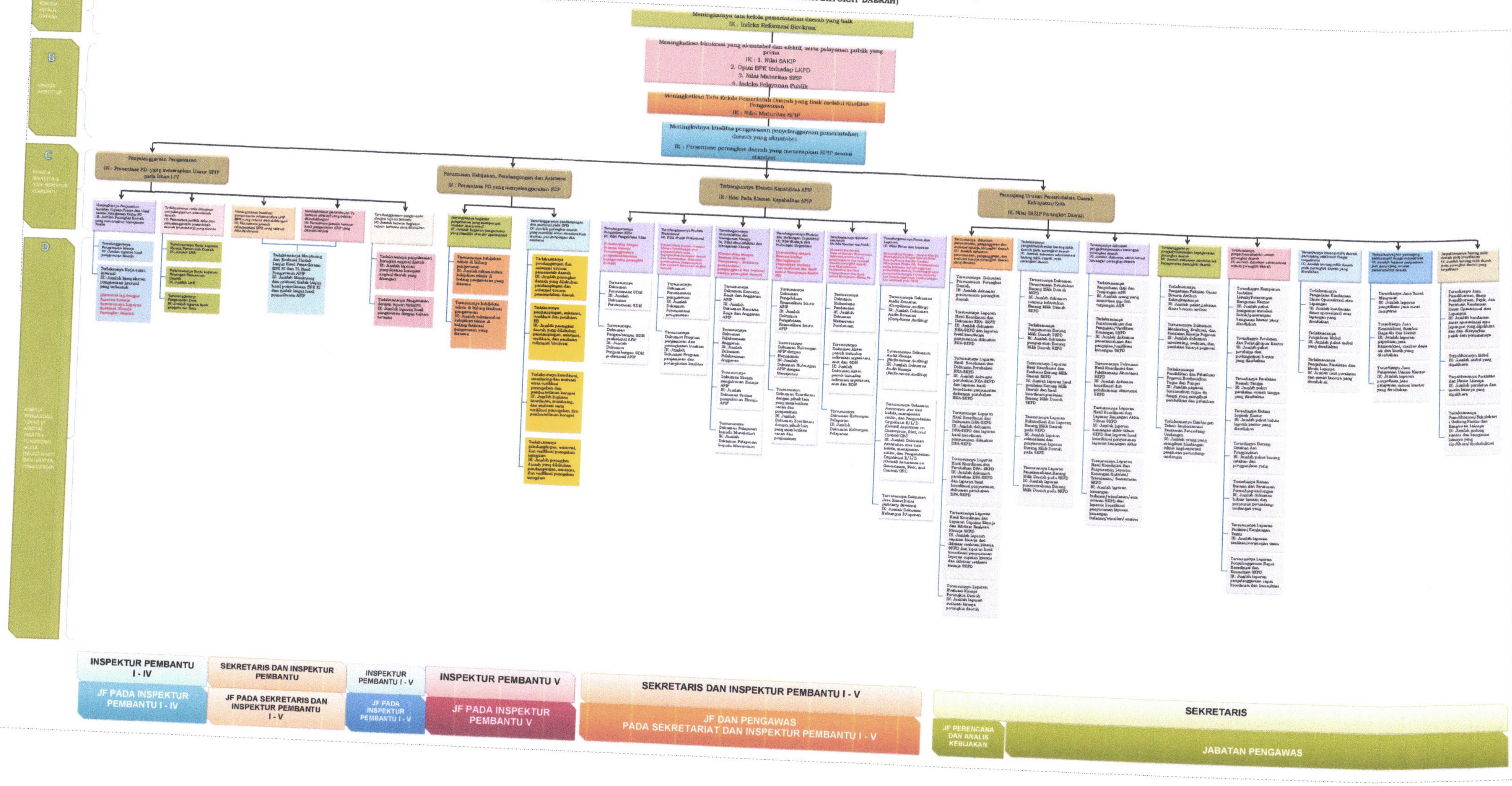
Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Pengawasan	Nilai Maturitas SPIP	3,200
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2025**
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	32%

Sumber: Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

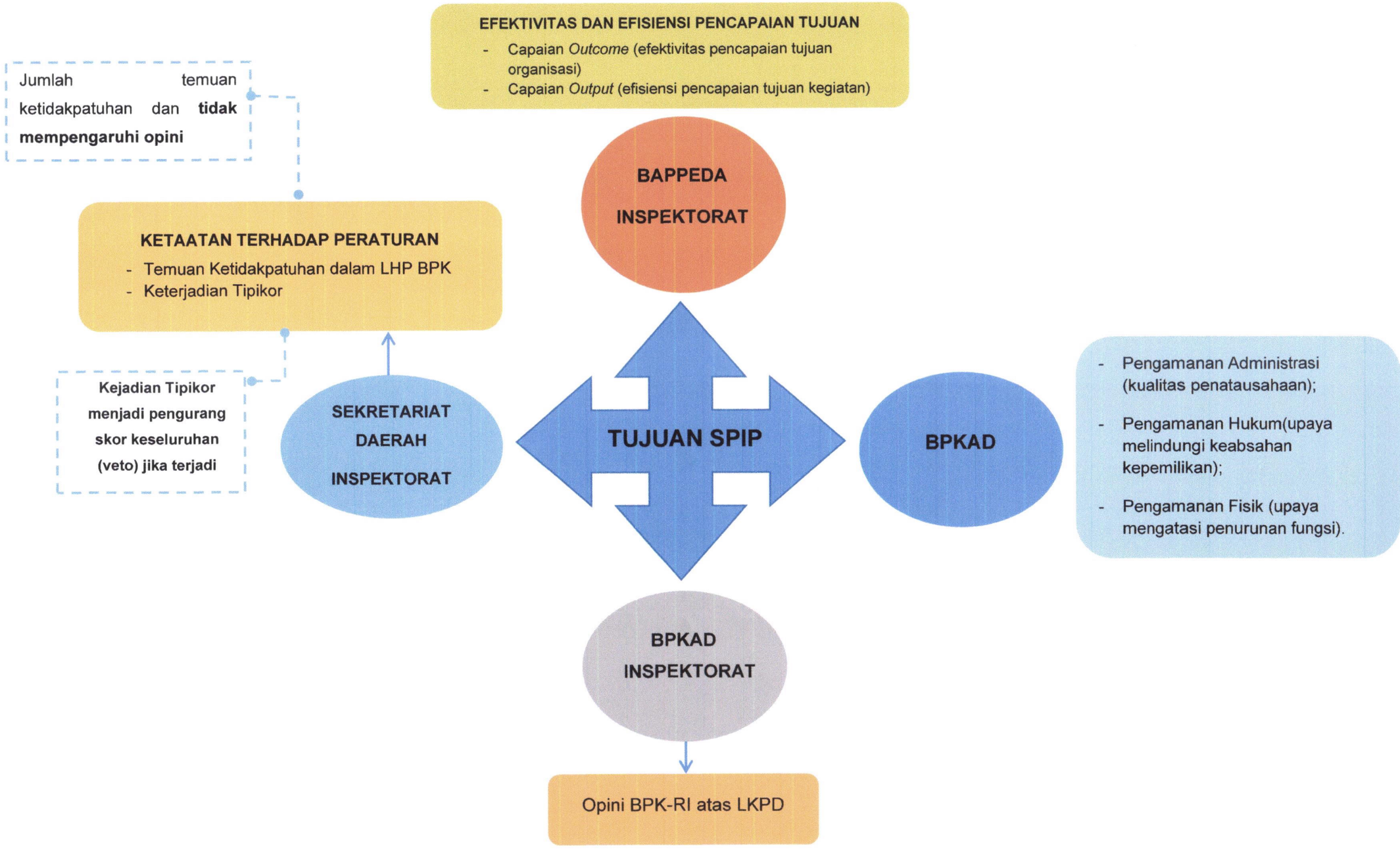
Pohon Kinerja Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk
Tahun 2025

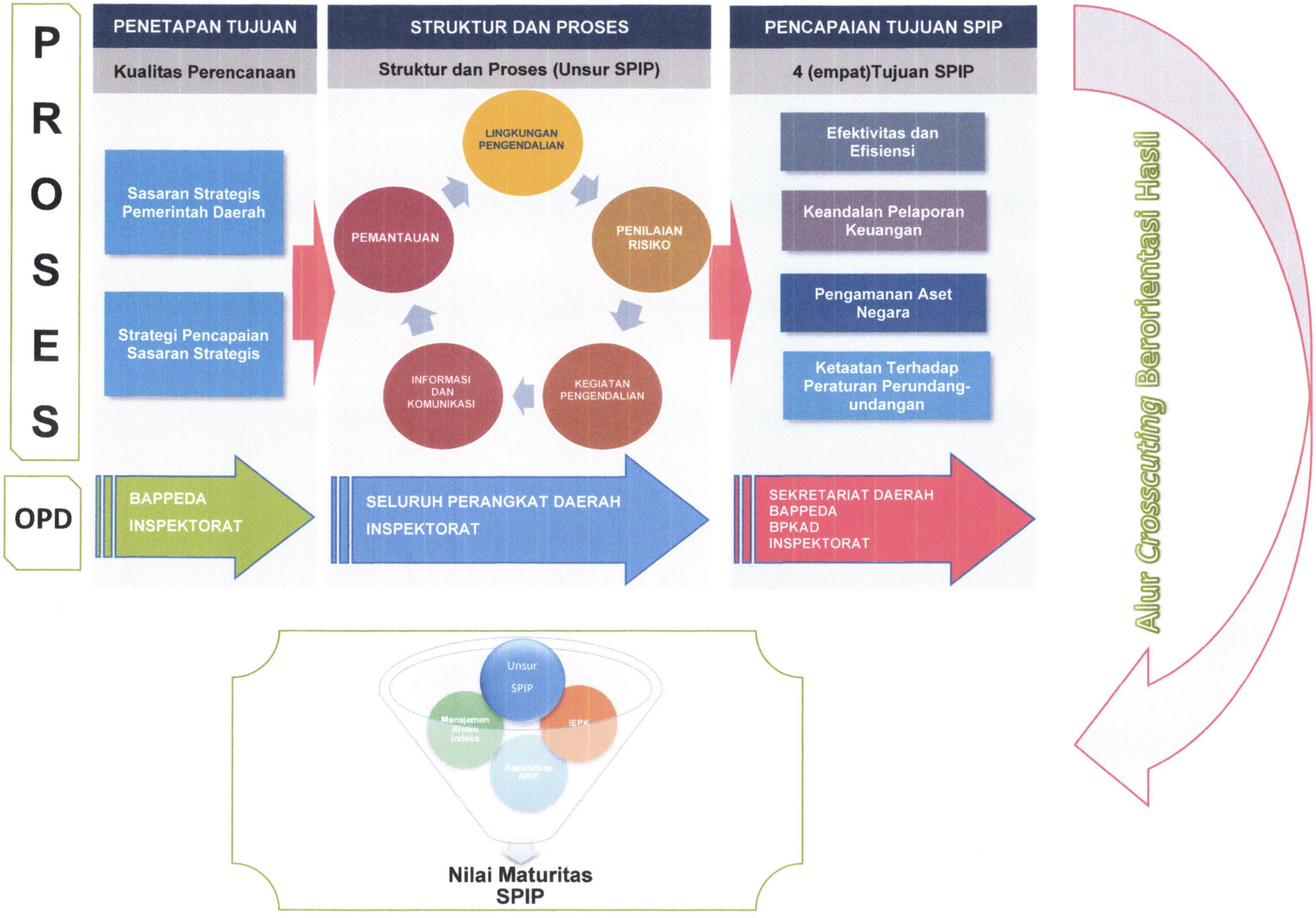


Cascading **Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025**
(Peraturan Menteri PAN RB Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah)
(SUSUNAN ORGANISASI TATAKERJA INSPEKTORAT DAERAH)

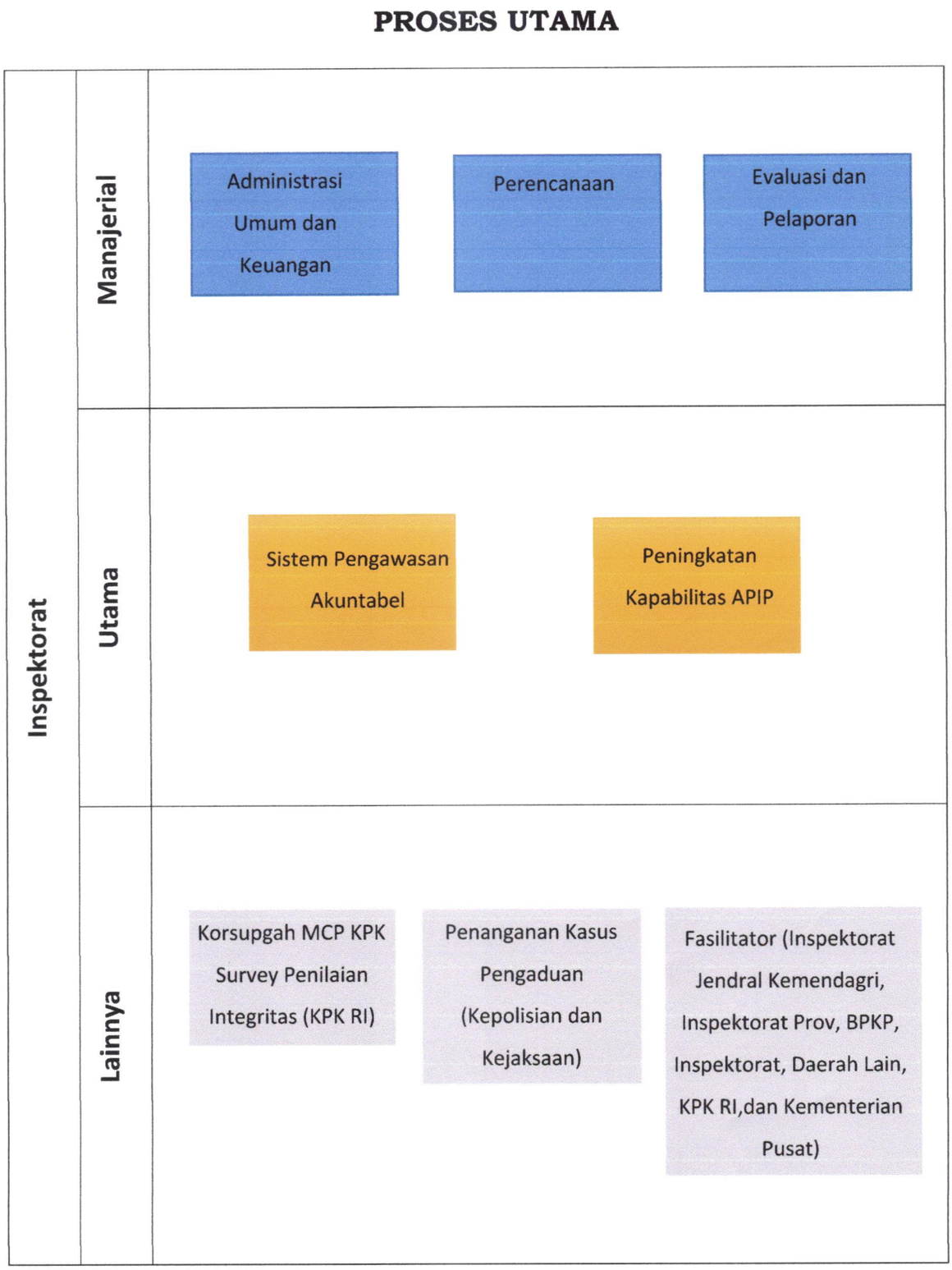


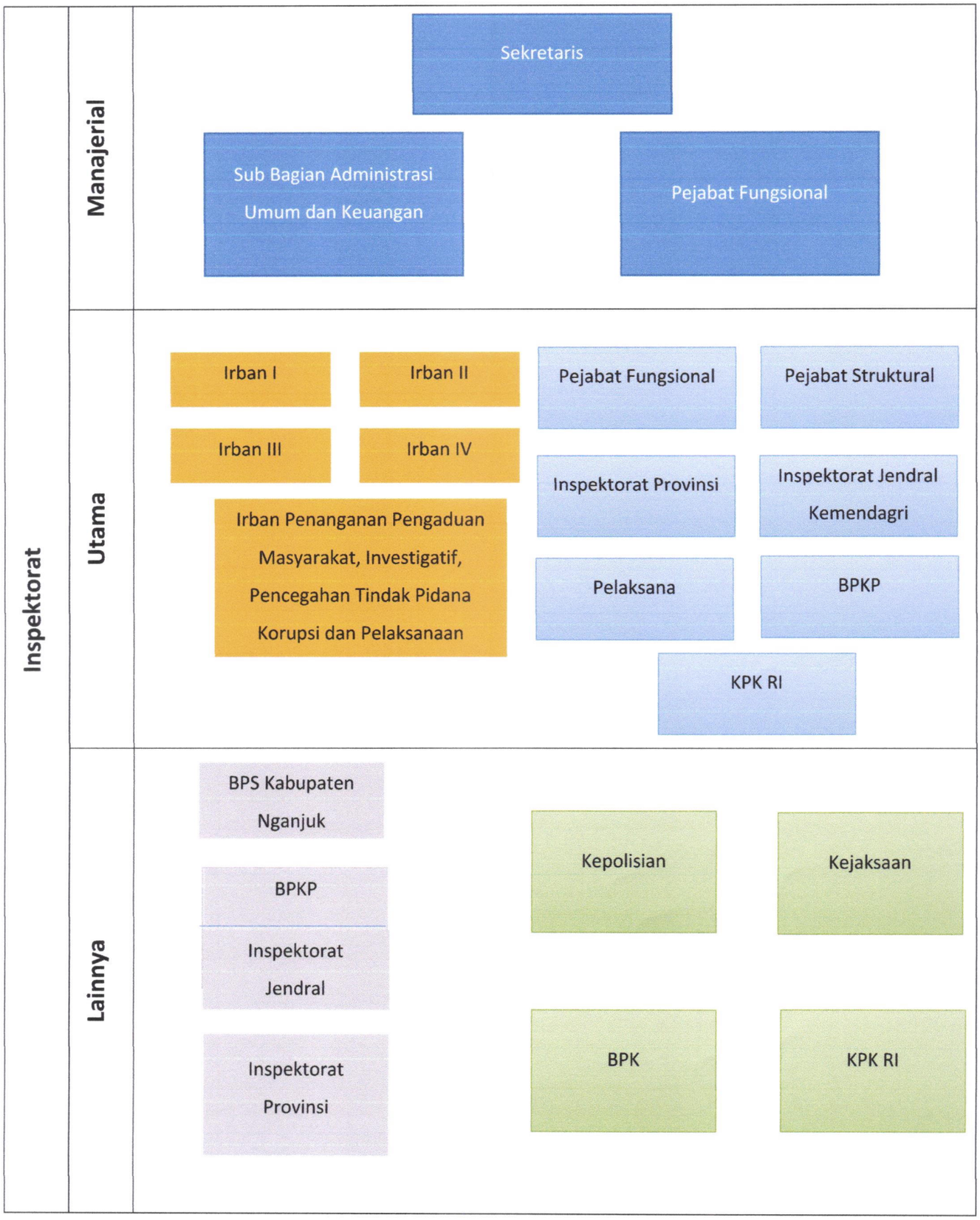
c. *Crosscutting* Kinerja Inspektorat Daerah



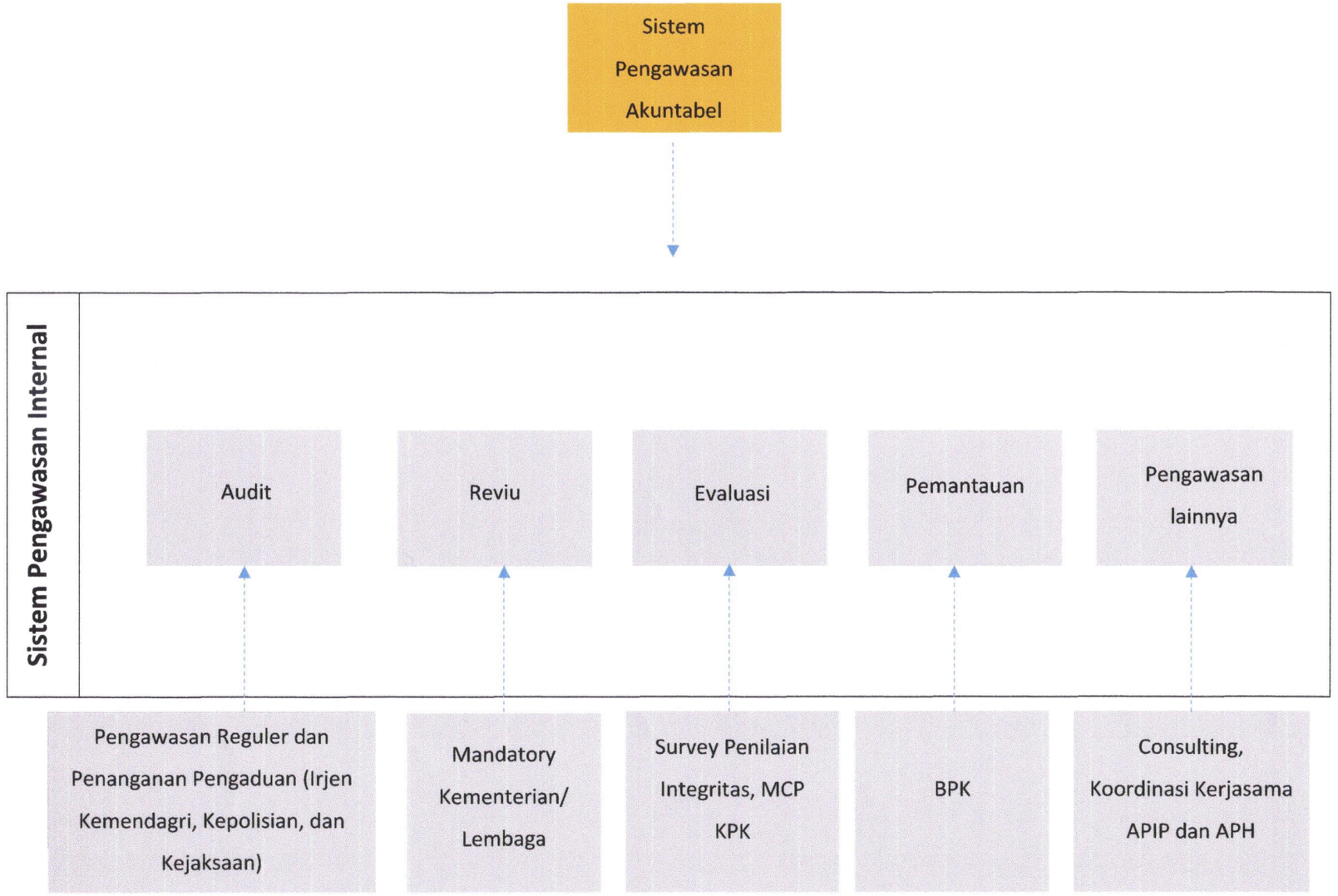

P
R
O
S
E
S
PENETAPAN TUJUAN
Kualitas Perencanaan
Sasaran Strategis Pemerintah Daerah
Strategi Pencapaian Sasaran Strategis
STRUKTUR DAN PROSES
Struktur dan Proses (Unsur SPIP)
LINGKUNGAN PENGENDALIAN
PENILAIAN RISIKO
KEGIATAN PENGENDALIAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PEMANTAUAN
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP
4 (empat)Tujuan SPIP
Efektivitas dan Efisiensi
Keandalan Pelaporan Keuangan
Pengamanan Aset Negara
Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan
OPD
BAPPEDA
INSPEKTORAT
SELURUH PERANGKAT DAERAH
INSPEKTORAT
SEKRETARIAT DAERAH
BAPPEDA
BPKAD
INSPEKTORAT
Alur Crosscuting Berorientasi Hasil
Unsur SPIP
Manajemen Risiko Indeks
IEPK
Kapabilitas APIP
Nilai Maturitas SPIP

d. Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah




Inspektorat
Manajerial
Sekretaris
Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
Pejabat Fungsional
Utama
Irban I
Irban II
Irban III
Irban IV
Irban Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigatif, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan
Pejabat Fungsional
Pejabat Struktural
Inspektorat Provinsi
Inspektorat Jendral Kemendagri
Pelaksana
BPKP
KPK RI
Lainnya
BPS Kabupaten Nganjuk
BPKP
Inspektorat Jendral
Inspektorat Provinsi
Kepolisian
Kejaksaan
BPK
KPK RI

SISTEM PENGAWASAN AKUNTABEL



3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

3.3.1. Pencapaian Target Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memberikan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, dengan target 100% (seratus persen) untuk semua jenis penerima layanan setiap tahun, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
1.	Pendidikan anak usia dini	100%
2.	Pendidikan dasar	100%
3.	Pendidikan kesetaraan	100%
4.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
5.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%
6.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
7.	Pelayanan kesehatan balita	100%
8.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%
9.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%
10.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%
11.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%
12.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%
13.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%
14.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100%
15.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)	100%
16.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
17.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100%
18.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100%
19.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	100%
20.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%
21.	Pelayanan informasi rawan bencana	100%
22.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
23.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
24.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
25.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%
26.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100%
27.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%
28.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%
29.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100%

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT KAB. NGANJUK
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT						**15.858.813.282,00**							**15.770.000.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**15.858.813.282,00**							**15.770.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**15.858.813.282,00**							**15.770.000.000,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Inspektorat Daerah***	**87 Nilai**			**87 Nilai**	**13.625.858.762,00**						**87 Nilai**	**13.225.000.000,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun*	42 Dokumen			11 dokumen	109.236.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	14 Dokumen	44.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen			2 Dokumen	48.090.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	2 Dokumen	12.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	16.788.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	1 Dokumen	6.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	16.788.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	1 Dokumen	6.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan			7 Laporan	27.570.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	7 Laporan	20.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah*	189 Dokumen			98 dokumen	7.875.798.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	63 Dokumen	9.630.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan			51 Orang/bulan	7.788.543.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	55 Orang/bulan	9.500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	156 Dokumen			97 Dokumen	72.180.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	52 Dokumen	110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan			1 Laporan	15.075.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	1 Laporan	20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*	21 Dokumen			18 dokumen	69.932.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	7 Dokumen	5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen			2 Dokumen	17.612.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	2 Dokumen	2.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan			16 Laporan	52.320.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	2 Laporan	2.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah*	165 Dokumen			51 dokumen	1.358.716.980,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	55 Dokumen	797.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	330 Paket			51 Paket	28.201.980,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	110 Paket	47.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang			45 Orang	848.300.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	45 Orang	500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang			51 Orang	482.215.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	55 Orang	250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah*	153 Dokumen			50 Dokumen	758.735.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	51 Dokumen	1.025.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	28.277.435,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	6 Paket	30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket			4 Paket	14.275.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	9 Paket	30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket			4 Paket	19.524.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	5 Paket	25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Paket			4 Paket	209.741.915,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	6 Paket	200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket			4 Paket	35.139.150,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	5 Paket	40.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen			1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	1 Dokumen	18.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan			12 Laporan	23.283.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	12 Laporan	35.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108 Laporan			36 Laporan	333.244.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	36 Laporan	447.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	83.250.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	1 Dokumen	200.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan*	243 Unit			303 Unit	2.423.489.632,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	90 Unit	685.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	999.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk		0,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	135 Unit			145 Unit	412.593.105,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	50 Unit	135.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	105 Unit			156 Unit	1.011.896.527,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	40 Unit	550.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	36 Laporan			12 Laporan	480.050.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	12 Laporan	414.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			4 Laporan	11.250.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	4 Laporan	14.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			4 Laporan	186.600.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	4 Laporan	250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			4 Laporan	282.200.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	4 Laporan	150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpelihara*	308 Unit			128 Unit	549.900.650,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	109 Unit	625.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit			24 Unit	210.124.650,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	19 Unit	250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit			50 Unit	20.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	35 Unit	35.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	143 Unit			50 Unit	100.512.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	50 Unit	90.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit			4 Unit	219.264.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	5 Unit	250.000.000,00	INSPEKTORAT
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan unsur SPIP***	**70 %**			**70 %**	**998.140.700,00**						**70 %**	**1.415.000.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah PD yang menerapkan manajemen risiko* *Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah (mandatory) yang direviu* *Persentase jumlah rekomendasi BPK yang selesai ditindaklanjuti* *Persentase jumlah temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti*	90 % 95 % 35 OPD 100 %			35 OPD 100 % 80 % 92 %	798.126.700,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	90 % 95 % 35 OPD 100 %	1.045.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	24 Laporan			4 Laporan	164.836.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	8 Laporan	250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan			1 Laporan	35.480.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	2 Laporan	40.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	357 Laporan			119 Laporan	98.100.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	119 Laporan	80.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	300 Laporan			100 Laporan	54.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	100 Laporan	140.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3 Kesepakatan			1 Kesepakatan	52.178.200,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	1 Kesepakatan	85.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	18 Dokumen			6 Dokumen	393.532.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	6 Dokumen	450.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilakukan*	24 Laporan			2 Laporan	200.014.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	8 Laporan	370.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan			1 Laporan	40.264.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	4 Laporan	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan			1 Laporan	159.750.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	4 Laporan	270.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Persentase Perangkat Daerah yang melakukan FCP (Fraud Control Planning)***	**15 %**			**15 %**	**1.234.813.820,00**						**15 %**	**1.130.000.000,00**	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional*	2 Kegiatan			2 kegiatan	245.910.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	2 Kegiatan	230.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi			1 Rekomendasi	142.910.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	1 Rekomendasi	90.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi			1 Rekomendasi	103.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	1 Rekomendasi	140.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah perangkat daerah yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi*	52 OPD			52 OPD	988.903.820,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	52 OPD	900.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	52 perangkat daerah			52 perangkat daerah	426.100.060,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	52 perangkat daerah	400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	52 perangkat daerah			52 perangkat daerah	71.020.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	52 perangkat daerah	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	9 Kegiatan			3 Kegiatan	437.049.760,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	3 Kegiatan	300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	52 perangkat daerah			52 perangkat daerah	54.734.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	P8 - Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi P6 Kab : Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Serta Digitalisasi Pelayanan Publik	Kab. Nganjuk	52 perangkat daerah	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	JUMLAH							**15.858.813.282,00**							**15.770.000.000,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2025)
1.	Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Inovasi serta Digitalisasi Pelayanan Publik	15.858.813.282

Tabel 4.2
Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2025)	Alokasi (2025)
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	32%	15.858.813.282

Tabel 4.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp. 000)
		Uraian (Output)	Target	
	Program Penunjang Urusan Pemerintshan Daerah Kabupaten/ Kota	**Program Penunjang Urusan Pemerintshan Daerah Kabupaten/ Kota**	**87**	**13.625.858,762**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**11 dokumen**	**109.236,500**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan	2 dokumen	48.090,500

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp. 000)
		Uraian (Output)	Target	
		Perangkat Daerah		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	16.788
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	16.788
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	27.570
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**18 dokumen**	**69.932**
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	17.612
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 laporan	52.320
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**98 dokumen**	**7.875.798**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51 orang/bln	7.788.543

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp. 000)
		Uraian (Output)	Target	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	97 dokumen	72.180
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	15.075
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**51 dokumen**	**1.358.716,980**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	51 paket	28.201,980
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45 orang	848.300
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	51 orang	482.215
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**50 dokumen**	**758.735**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 paket	28.277,435

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp. 000)
		Uraian (Output)	Target	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 paket	14.275
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 paket	19.524,500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 paket	209.741,915
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 paket	35.139,150
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 dokumen	12.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	23.283
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 laporan	333.244
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	83.250
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**303 unit**	**2.423.489,632**
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 unit	999.000
	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	145 unit	412.593,105
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	156 unit	1.011.896,527
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 laporan**	**480.050**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	11.250
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	4 laporan	186.600

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp. 000)
		Uraian (Output)	Target	
	Air dan Listrik	Daya Air dan Listrik		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 laporan	282.200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**128 unit**	**549.900,650**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24 unit	210.124,650
	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	50 unit	20.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50 unit	100.512
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 unit	219.264
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan unsur SPIP**	**70%**	**998.140,700**
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Jumlah PD yang menerapkan Manajemen Risiko**	**35 OPD**	**798.126,700**
		Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah (mandatory) yang direviu		
		Persentase jumlah rekomendasi BPK yang selesai ditindaklanjuti		
		Persentase jumlah temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti		

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp. 000)
		Uraian (Output)	Target	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	4 laporan	164.836
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	1 laporan	35.480
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	119 laporan	98.100
	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	100 laporan	54.000
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 kesepakatan	52.178,200
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	6 dokumen	393.532,500
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilakukan**	**2 laporan**	**200.014**
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	1 laporan	40.264
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	1 laporan	159.750
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIKAJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Persentase Perangkat Daerah yang melakukan FCP (Fraud Control Planning)**	**15%**	**1.234.813.820**
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Jumlah kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional**	**2 kegiatan**	**245.910**
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	142.910
	Perumusan Kebijakan Teknis	Jumlah rekomendasi	1 rekomendasi	103.000

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp. 000)
		Uraian (Output)	Target	
	di Bidang Fasilitasi Pengawasan	kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun		
	Pendampingan dan Asistensi	**Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan**	**52 OPD**	**988.903,820**
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	52 OPD	426.100,060
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	52 OPD	71.020
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	3 kegiatan	437.049,760
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	52 OPD	54.734

Tabel 4.4
Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	

NIHIL

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah dimaksud dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Inspektorat Daerah dengan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD), sebagai implementasi sasaran strategis rencana pembangunan daerah (RPD) dan Renstra Inspektorat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. Melaksanakan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
   b. Melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Inspektorat Daerah untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Inspektorat Daerah; dan
   c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Inspektorat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan
3. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Inspektorat Daerah dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H*I*, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001